

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW:  
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR**

Marshella Septi Zulefni<sup>1</sup>, Raesa Aldania Afendi<sup>2</sup>, Yuni Fitriani<sup>3</sup>, Rizki Ananda<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
marshellazulefni@gmail.com<sup>1</sup>, raesaaldaniaafendi@gmail.com<sup>2</sup>,  
Yuni.fitriani2003@gmail.com<sup>3</sup>, rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to conduct a systematic literature review on the standards of basic education management. The method used in this study is a systematic literature review, where various relevant literature sources are collected and comprehensively analyzed. This research identifies several standards of basic education management regulated by the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Regulation No. 19 of 2007. These standards encompass aspects such as program planning, implementation of work plans, supervision, evaluation, school/madrasah leadership, and management information systems. Through literature analysis, it is found that effective and standards-compliant education management plays a crucial role in creating efficient and effective education. This research also highlights the importance of the involvement of local governments in education management, especially at the basic education level.*

**Keywords:** *basic education, management, standard*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur sistematis mengenai standar pengelolaan pendidikan dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur sistematis, di mana berbagai sumber literatur yang relevan dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa standar pengelolaan pendidikan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. Standar tersebut mencakup aspek-aspek seperti perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, dan sistem informasi manajemen. Melalui analisis literatur, ditemukan bahwa pengelolaan pendidikan yang baik dan sesuai dengan standar nasional memiliki peran penting dalam menciptakan pendidikan yang efisien dan efektif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan dasar.

**Kata Kunci :** pendidikan dasar, pengelolaan, standar

## **A. Pendahuluan**

Pedoman untuk mengatur pengelolaan pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. Peraturan menetapkan setiap satuan pendidikan harus mematuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku nasional. Salah satu standar peraturan pemerintah adalah pengelolaan pendidikan (Iskandar, 2019).

Pengelolaan pendidikan mencakup pencapaian kriteria yang efisien dan efektif, yang didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, serta sistem informasi manajemen. Standar pengelolaan pendidikan juga menjadi tantangan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Rendahnya pencapaian standar pengelolaan pendidikan, terutama di satuan pendidikan dasar, juga dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan (Rahayu, 2015).

Lebih lanjut, Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, diuraikan tentang mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, adalah

pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pendidikan nasional memiliki fungsi dalam mengembangkan keahlian dan membangun watak serta peradaban bangsa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME memiliki akhlak terpuji, sehat, memiliki ilmu aktif kreatif dan mandiri menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab.

Standar Nasional, yang juga dikenal sebagai kerangka kerja pendidikan nasional, menjadi pedoman untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan guna mencapai tujuan nasional Indonesia dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Delapan standar pendidikan juga berperan dalam membentuk individu yang cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu komponen dari kerangka ini adalah standar penerapan yang meliputi persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di tingkat pusat, daerah, maupun

nasional. Dalam rangka tersebut, proses pendidikan harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan mengikuti ketentuan standar pendidikan (Pasaribu, 2017).

Berdasarkan keterangan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan tidak boleh melanggar aturan dalam standar pendidikan. Misi pendidikan tidak dapat terwujud tanpa adanya pengelolaan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus menyusun program pengelolaan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan disusun sebagai panduan bagi lembaga pendidikan dalam mengevaluasi, mempertimbangkan, dan mengubah tugas-tugas yang diperlukan. Selain itu, pengelolaan pendidikan juga berperan sebagai penunjang terjadinya kegiatan pendidikan yang berkualitas, untuk menciptakan warga negara yang kompeten (Setiawan, 2021).

Kualitas sistem pendidikan yang baik bergantung pada pengelolaan atau kontrol kepala

sekolah. Selain itu, manajemen akademik juga menjadi faktor kunci dalam sistem pendidikan untuk mengelola semua aspek akademik. Jika manajemen sekolah efektif, termasuk efektivitas manajemen sekolah, pemahaman tentang manajemen sekolah, dan organisasi sekolah yang baik, maka kualitas administrasi sekolah dianggap baik. Sekolah yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dan peran aktif orang tua dalam pengelolaan sekolah (Sholeh, 2016).

Pengelolaan atau kontrol kepala sekolah juga memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang baik. Selain itu, sistem pendidikan juga mengandalkan manajemen akademik untuk mengelola semua aspek akademik. Jika manajemen sekolah efektif, termasuk efektivitas manajemen sekolah, pemahaman manajemen sekolah, dan organisasi sekolah yang baik, maka kualitas administrasi sekolah dianggap baik. Sekolah yang baik tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat dan peran aktif orang tua dalam pengelolaan sekolah (Marfinda, 2022).

Keberhasilan tujuan pendidikan sangat bergantung pada manajemen pendidikan yang efektif. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu merencanakan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem manajemen pendidikan berperan sebagai panduan bagi lembaga pendidikan untuk mengevaluasi, memodifikasi, dan mengadaptasi layanan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sistem manajemen pendidikan juga mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan yang efektif guna menciptakan individu yang kompeten.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan konsep tinjauan pustaka dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dilakukan dengan identifikasi, mengkaji, evaluasi, serta menafsirkan seluruh penelitian yang tersedia. Peneliti melakukan review terhadap artikel-artikel yang sesuai dengan topik pertanyaan penelitian. Proses review dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada setiap prosesnya dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan (Triandini et al.,

2019). Kemudian, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap artikel yang sudah di review tersebut. Teknik *Systematic Literature Review* dilakukan dengan lima tahapan langkah yaitu: (1) membuat perumusan terhadap pertanyaan penelitian, (2) memetakan dan mencari artikel yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, (3) melakukan inklusi/klasifikasi dan eksklusi/evaluasi dengan menyeleksi terhadap artikel yang sudah dikumpulkan, (4) menyajikan dan mengolah data, (5) menginterpretasi hasil temuan dalam artikel tersebut dan berakhir pada penarikan kesimpulan (Nurfadilah et al., 2022).

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu menentukan tema yang akan dikaji. Peneliti mengambil tema “media digital dan pembelajaran tematik” sebagai topik yang akan digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data studi literatur dilakukan dengan cara mencari artikel google scholar menggunakan keyword “Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar”. Peneliti membatasi jumlah sebanyak 200 artikel dari tahun 2015 sampai 2024. Kemudian, peneliti menyaring kembali melalui tahapan seleksi satu

per satu terhadap isi artikel. Setelah dilakukan analisis, ditemukan 28 artikel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya dari bermacam ragam artikel tersebut, peneliti akan memilih lima artikel yang akan direview, dianalisis, dan dikaji ulang secara detail dan berkaitan dengan tema yang diteliti.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil data penelitian yang dimasukan dalam kajian literatur ini merupakan analisis dan rangkuman dari artikel terkait standar pengelolaan pendidikan dasar yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Penelitian Terkait Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar**

<b>No</b>	<b>Peneliti&amp;Tahun</b>	<b>Jurnal</b>	<b>Hasil</b>
1	(Khaulani et al., 2020)	Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan	Berdasarkan artikel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar terkait standar isi di sekolah dasar menyoroti pentingnya kesesuaian standar isi dengan karakteristik siswa pada usia 7-8 tahun. Standar isi pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang perlu diperhatikan dalam mengarahkan pendidikan dasar. Implementasi standar isi di sekolah dasar menjadi panduan dalam membimbing peserta didik menghadapi tantangan globalisasi dan mempertahankan identitas bangsa. Selain itu, kesimpulan dari artikel tersebut juga menekankan pentingnya pengembangan standar isi pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia. Standar isi yang tepat akan membantu menciptakan pendidikan yang berkualitas, menghasilkan individu yang berkualitas, serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan bangsa pada masa depan. Dengan demikian, implementasi standar isi pendidikan dasar yang optimal akan mendukung visi Indonesia menuju golden era pada tahun 2045.
2	(Muthmainnah et al., 2023)	Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains	Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya manajemen pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Artikel tersebut membahas tentang standar pengelolaan pendidikan dasar yang mencakup aspek administrasi, proses pendidikan, sumber pendanaan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengelolaan administrasi sekolah. Standar

No	Peneliti&Tahun	Jurnal	Hasil
			tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam pengelolaan pendidikan, serta perlunya penguatan dalam berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, guru, ekonomi, dan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya manajemen pendidikan yang baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkualitas di Indonesia.
3	(Arsyad et al., 2021)	IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam	Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pemahaman responden terhadap standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar menunjukkan bahwa kepala madrasah dan guru madrasah secara umum memiliki pemahaman dengan kategori cukup paham, sementara komite madrasah memiliki pemahaman dengan kategori kurang paham. Implementasi standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap implementasi tata kelola Sekolah dasar menunjukkan bahwa kepala madrasah dan guru masih menganggap belum mengimplementasikan standar dengan penilaian rata-rata kurang, sedangkan komite madrasah menganggap sangat kurang paham.
4	(Faishal, 2017)	Jurnal Evaluasi	Berdasarkan isi artikel yang terlampir, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dibuat untuk mensejahterakan kualitas manajemen di sekolah/madrasah dan perlu dianalisis secara mendalam untuk pengembangan kualitas pelayanan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa dan pembangunan karakter bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur penggunaan Standar Nasional Pendidikan

No	Peneliti&Tahun	Jurnal	Hasil
			(SNP) sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan, termasuk kurikulum, proses pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan tujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
5	(Palettei et al., 2021)	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap regulasi standar pengelolaan pendidikan tergolong cukup paham, sedangkan komite sekolah memiliki pemahaman yang kurang. Selain itu, berdasarkan analisis data, kepala sekolah dan guru menganggap implementasi tata kelola sekolah tergolong cukup sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, sedangkan menurut komite sekolah, implementasinya tergolong kurang. Faktor utama dalam implementasi tata kelola sekolah adalah pemahaman individu warga sekolah terhadap standar pengelolaan pendidikan, termasuk apa yang termasuk dalam standar pengelolaan pendidikan, bagaimana perannya dalam implementasi, dan dampaknya jika tata kelola sekolah tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Artikel ini memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan implementasi standar pengelolaan pendidikan di sekolah dasar untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, terhadap standar pengeolaan pendidikan dasar dapat diketahui bahwa standar manajemen pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi

pendidikan (Warisno, 2021). Kepala unit pelatihan bertanggung jawab atas pengelolaan unit pelatihan Standar manajemen terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu standar manajemen satuan pendidikan, standar manajemen pemerintah provinsi, dan standar manajemen pemerintah (Khaulani et al., 2020).

Berikut adalah Peraturan tentang Standar Manajemen Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Satuan Sekolah Dasar dan Menengah.

1. Standar administrasi oleh satuan pendidikan menurut Pasal 49 Manajemen khusus sekolah digunakan dalam pengelolaan satuan sekolah dasar dan menengah yang tercermin dalam kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan tanggung jawab. Pimpinan satuan pendidikan tinggi mewujudkan otonomi pendidikan tinggi
2. Standar Manajemen Administrasi Menurut Pasal 60, pemerintah menyusun rencana kerja tahunan

bidang pendidikan dengan memprioritaskan program-program berikut: wajib belajar; peningkatan angka partisipasi dalam pendidikan menengah dan tinggi; penghapusan buta huruf; Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, keduanya adalah milik negara dan masyarakat; menaikkan status profesi guru; peningkatan kualitas dosen; standardisasi pendidikan; akreditasi pelatihan; meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal, nasional dan global; Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelatihan; dan penjaminan mutu nasional dalam pendidikan.

3. Standar Administrasi Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 59 Ayat 1, pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program-program berikut: wajib belajar; peningkatan angka pendaftaran sekolah menengah atas; penghapusan buta huruf; Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, keduanya adalah milik negara wilayah dan



masyarakat; menaikkan status profesi guru; akreditasi pelatihan; Meningkatkan pentingnya pendidikan bagi kebutuhan masyarakat dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelatihan.

4. Berbagai aspek standar kepemimpinan sekolah yang harus dipenuhi antara lain: desain program, Pelaksanaan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi Manajemen Sekolah/Madrasah sistem manajemen informasi.

Keputusan Menteri No. 19 Tahun 2007 Pasal I menyatakan bahwa setiap sekolah wajib memiliki rencana proses pendidikan, yaitu Program rencana aksi, pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pemeringkatan sekolah, SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan hibah khusus. Batasan penerapan pendidikan adalah cara memelihara, memajukan, dan menerapkan keterampilan pendidikan secara adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sedangkan untuk bidang manajemen pendidikan, termasuk misi memajukan pendidikan, maka proses kerjasama di masing-masing bidang akan

dilakukan melalui penguatan pengajaran kurikulum, penguatan pendidikan siswa, penguatan pendidikan guru, penguatan pendidikan ekonomi, penguatan pendidikan Saprass dan penguatan pembangunan daerah. masyarakat Pendidikan keterampilan, penguatan pendidikan, pengelolaan sekolah terorganisir, penguatan pelatihan tenaga kerja, pengelolaan arsip pendidikan, penguatan pendidikan penelitian, dan penguatan pendidikan manajemen keterampilan Ruang lingkup administrasi pendidikan ini dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut (Muthmainnah et al., 2023):

1. Pengelolaan kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendataan mata pelajaran/mata kuliah yang diajarkan, waktu yang tersedia. jumlah guru dan pembagian pelajaran, jumlah pelajaran, jadwal. Kegiatan belajar mengajar, buku wajib, evaluasi program semester, program tahunan, kalender pendidikan, perubahan kurikulum dan inovasi pengembangan kurikulum.

2. Manajemen kemahasiswaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Pengelolaan dan evaluasi ujian masuk siswa baru, pelaksanaan ujian seleksi siswa baru, penempatan dan pembagian kelas, kegiatan kemahasiswaan. Dorongan dan upaya peningkatan mutu lulusan, dll.
3. Pelatihan personel (staf) manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai baru, monitoring dan evaluasi, mutasi, surat-menyurat Keputusan tentang surat tugas, file guru, daftar staf total, biaya meningkatkan sumber daya manusia dan kinerja karyawan, dll.
4. Pengelolaan keuangan penunjang pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dana masuk dan keluar, usaha Menjelajahi sumber pendanaan untuk sekolah, seperti kemitraan dan penggunaannya Efisien.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perolehan, pendistribusian dan penggunaan barang (inventory). Perbaikan barang, penukaran atau pembuangan barang.
6. Pengelolaan administrasi sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasional sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik semua kebutuhan dan kegiatan yang terkait Lembaga.
7. Manajemen hubungan masyarakat, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat, mis. B. Pengumpulan data dari kantor/perorangan, hasil kerjasama, program Humas.
8. Pengelolaan unit penunjang pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan unit penunjang, misalnya UKS Bimbingan Perpustakaan (BK). Pramuka, Olahraga, Kesenian dll.
9. Manajemen ekstrakurikuler dipahami sebagai segala proses

yang direncanakan dan dikelola secara terorganisir dalam kegiatan sekolah di luar kelas dan di luar kurikulum untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) peserta didik, baik yang berkaitan dengan penerapannya. dari pengetahuan mereka. terlibat dan, dalam arti khusus, membimbing siswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka melalui kegiatan wajib dan pilihan.

10. Administrasi layanan pendidikan khusus, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan layanan khusus, mis. menu makanan/konsumen, layanan bawa pulang, perawatan rumah khusus, dll.

Pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal ini sekolah/madrasah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh

pemerintah. Manajemen sekolah/madrasah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih (Arsyad et al., 2021). Melalui kinerja kepala sekolah/madrasah, guru dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kaitannya dengan manajemen sekolah/madrasah adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh pihak sekolah/madrasah dengan mengimplementasikan tata kelola sekolah/madrasah untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Faishal, 2017).

Sehubungan dengan itu, maka tata kelola pendidikan di sekolah/madrasah harus; (1) kepemimpinan di sekolah/madrasah dijalankan sesuai tata kelola sekolah/madrasah secara efektif dan efisien, (2) memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dan (3) menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat hingga dapat melibatkan mereka secara aktif

dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan.

Berangkat dari hal tersebut, asumsi yang mendasari penelitian ini berangkat dari konsep bahwa pemahaman kepala madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah terhadap standar pengelolaan pendidikan akan meningkatkan implementasi mutu pengelolaan pendidikan secara efisiensi dan efektif. Sebagai landasan kajian, maka penelitian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian, antara lain: *Pertama*, hasil kajian tentang Upaya Meningkatkan Nilai Delapan Standar Nasional Pendidikan Akreditasi Sekolah melalui Supervisi Pembimbingan Terpadu pada Sekolah dasar di Kabupaten Sleman, dijelaskan bahwa pemahaman terhadap supervisi sebagai acuan normatif merupakan salah satu usaha yang di desain dengan fungsi; (1) mengarahkan, mengkoordinir, membimbing dan membina guru secara berkelanjutan (kontinu) baik secara individual ataupun kolektif dengan tujuan agar kinerja guru menjadi lebih baik, (2) memberi penilaian terhadap pengelolaan pendidikan di madrasah, dan (3)

memecahkan berbagai masalah pendidikan secara efektif dan efisien.

*Kedua*, hasil penelitian yang menjelaskan tentang pemahaman dan implementasi standar pengelolaan pendidikan di Sekolah dasar harus dimulai dari sebuah proses transformasi, melalui peran dari kepala madrasah, guru dan komite madrasah yang akan mempengaruhi individu masing-masing personil untuk memahami dan mengimplementasikan tata kelola pendidikan, hal tersebut dikemukakan dalam penelitian tentang tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu bahwa untuk mewujudkan manajemen tata kelola sekolah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar yang sejalan dengan tantangan revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-physical system, sekolah dasar harus menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi era globalisasi.

Adapun peran kepala madrasah, guru, dan komite sekolah/madrasah, yaitu sebagai

berikut: *Pertama*, peran kepala sekolah/madrasah dalam tata kelola pendidikan. Peran kepala sekolah/madrasah dalam menggerakkan kehidupan sekolah untuk mencapai tujuan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2017, tentang Kepala Madrasah, Pasal 3 ayat (1) bahwa tugas kepala madrasah adalah; melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan<sup>8</sup>. Kepemimpinan di sekolah/madrasah adalah untuk memberdayakan guru, tenaga kependidikan dan masyarakat yang terlibat dengan memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai pemimpin di sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dituntut untuk bertindak *not us usual, but different and distinctive* sekaligus secara berkelanjutan makin produktif, efektif, efisien dan akuntabel.

Kepala sekolah/madrasah sebagai perencana dalam pelaksanaan tugasnya harus memahami tiga aspek yaitu; kondisi sekolah/madrasah yang ada (*fact*),

kebijakan-kebijakan yang berlaku (*policy*), dan strategi implementasi yang efektif dan efisien (*theory*). Untuk itu, sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah/madrasah harus mampu memandu, membimbing, membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa SDM yang ada untuk mencapai sasaran yang ingin dituju secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan, waktu dan perencanaan.

*Kedua*, peran guru dalam tata kelola pendidikan di sekolah/madrasah. Guru sekolah/madrasah merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Peran guru yang muncul secara intens selama ini dalam tata kelola sekolah/madrasah adalah sebagai pelaksana. Kebanyakan guru masih menganggap tugasnya adalah mengajar, setelah mengajar, mereka bebas dari tugas, sehingga berbagai hal yang terkait dengan tata kelola sekolah/madrasah ia lebih memilih menjadi pelaksana, karena ia menilai bahwa kewajibannya menjadi

tanggung jawab pimpinan sekolah/madrasah.

Peran guru dalam melaksanakan tata administrasi sekolah sangat penting, dan tidak bisa dipisahkan antara komponen yang satu dengan yang lain. Melihat tugas dan peran guru di sekolah/madrasah yang sebagai unsur yang berhadapan dengan peserta didik, maka guru yang bermutu merupakan faktor dan sangat menentukan bagi kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab peningkatan kualitas guru merupakan faktor penting dalam mewujudkan SDM bangsa yang bermutu, yang siap dan mampu bersaing dalam pergaulan dan pasar kerja global saat ini.

*Ketiga*, peran komite dalam tata kelola pendidikan di sekolah/madrasah. Dalam mengimplementasikan hubungan sekolah dengan masyarakat, salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengoptimalkan peran komite sekolah/madrasah yang dibentuk berdasarkan musyawarah oleh stakeholder pendidikan di tingkat sekolah/madrasah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap

peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI.

Untuk itu, melalui manajemen tata kelola Sekolah dasar yang berjalan dengan baik yang melibatkan kepala, guru dan komite Sekolah dasar, serta menjalin kerja sama yang harmonis antara sekolah, masyarakat dan pemerintah, diyakini dapat meningkatkan mutu tata kelola Sekolah dasar secara efisiensi dan efektif sesuai standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Palettei et al., 2021). Mengacu pada kebijakan pemerintah tentang standar pengelolaan pendidikan untuk memenuhi ketercapaian SNP, maka kepala sekolah, guru, dan komite sekolah harus memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi standar

pengelolaan pendidikan sehingga tata kelola sekolah berjalan sesuai dengan pedoman instrumen pengelolaan pendidikan di sekolah. Di samping itu, bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui manajemen berbasis sekolah, di mana dalam manajemen berbasis sekolah setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dan menyelenggarakan program pendidikannya yang melibatkan semua unsur (Achadah, 2019).

Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi standar pengelolaan pendidikan sehingga tata kelola sekolah berjalan sesuai dengan pedoman instrumen pengelolaan pendidikan di sekolah, maka dapat memperkuat kebijakan implementasi standar pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar, khususnya di Sekolah dasar melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif agar dapat mendukung proses pendidikan ke depan dengan tantangan baru yakni pengelolaan kurikulum sesuai standar pendidikan era 4.0, konsep pembelajaran berbasis digital, serta guru

profesional dan berkualitas. Dengan demikian, penguatan SDM Sekolah dasar diharapkan mampu menjawab tantangan dalam penyelenggaraan proses pendidikan sesuai standar pengelolaan pendidikan dengan manajemen modern berbasis sekolah dan berbasis jaringan internet. Oleh karena itu, semua unsur pendidikan harus berupaya untuk memenuhi standar pengelolaan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan dasar, termasuk guru dan masyarakat secara harus terlibat secara aktif dan proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta bersama-sama dengan stake holder pendidikan dan pimpinan Sekolah dasar berkewajiban untuk mencapai standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah, khususnya di Sekolah dasar.

#### **D. Kesimpulan**

Standar pengelolaan pendidikan dasar memainkan peran yang penting dalam menjamin kualitas dan efektivitas pendidikan pada tingkat dasar. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, evaluasi,

kepemimpinan sekolah/madrasah, dan sistem informasi manajemen. Menaatinya standar ini sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Pengelolaan pendidikan yang efektif sesuai dengan standar nasional berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa serta perkembangan keseluruhan siswa. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan juga sangat penting. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih baik, pengembangan infrastruktur, dan sistem pendukung bagi sekolah. Kerjasama ini memastikan bahwa lembaga pendidikan dasar menerima sumber daya dan bantuan yang diperlukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan serta memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa.

Secara keseluruhan, mengikuti standar pengelolaan pendidikan dasar sangat penting untuk menjamin penyediaan pendidikan berkualitas, mendorong perkembangan siswa, dan mengoptimalkan pengalaman pendidikan secara keseluruhan pada tingkat dasar. Standar ini

memberikan kerangka kerja bagi praktik pendidikan yang efektif dan berkontribusi pada perbaikan terus-menerus sistem pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achadah, A. (2019). Manajemen berbasis sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4(2), 77–88.
- Arsyad, Sulfemi, W. B., & Munthoi, A. (2021). Pemahaman dan Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 4(02), 259–278. <https://doi.org/10.37542/iq.v4i02.239>
- Faishal, H. M. (2017). Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. *Journal Evaluasi*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i1.63>
- Iskandar, W. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1–22.
- Khaulani, F., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Isi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 121–127. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>
- Marfinda, E. (2022). Manajemen



- Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Kinerja Guru. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(3), 238–248.
- Muthmainnah, W., Putri, J., Adilla, P., & Ananda, R. (2023). Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar. *Masaliq: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(4), 482–490. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq>
- Nurfadilah, A., Hakim, A. R., & Nurropidah, R. (2022). Systematic Literature Review: Pembelajaran Matematika pada Materi Luas dan Keliling Segitiga. *Polinomial: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 1–13.
- Palettei, A. D., Sulfemi, W. B., & Yusfitriadi. (2021). Tingkat Pemahaman Kepala Sekolah, Guru, Dan Komite Sekolah Terhadap Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 38–53. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1592>
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak, Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1).
- Setiawan, H. R. (2021). *Manajemen Peserta Didik: (Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan* (Vol. 1). umsu press.
- Sholeh, M. (2016). Keefektifan Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 1(1), 41–54.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77.
- Warisno, A. (2021). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam. *An Nida*.
-